

ABSTRAK

Helen Karolina Hutauruk. NIM. 3123111030. Upaya Kepolisian dalam Mengatasi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus: Polres Serdang Bedagai). Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya kepolisian dalam mengatasi tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkoba di wilayah hukum Kabupaten Serdang Bedagai. Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polres Serdang Bedagai. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode deskriptif kualitatif yaitu suatu cara atau metode yang disajikan dalam bentuk paparan atau gambaran dari temuan-temuan yang ada di lapangan. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah 18 orang anggota kepolisian Sat Narkoba Serdang Bedagai. Teknik pengumpulan data diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk menganalisis data digunakan teknik analisis data dengan menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan ada 3 upaya yang dilakukan pihak kepolisian Sat Res Narkoba Polres Serdang Bedagai dalam mengatasi tindak pidana penyalahgunaan narkoba yaitu, pertama upaya pre-emptif, yaitu upaya pencegahan dini yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan melakukan penyuluhan. Kedua upaya preventif, yaitu upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan melakukan razia, patroli. Ketiga upaya represif, yaitu upaya penindakan atau pengakuan hukum. Kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam mengatasi tindak pidana penyalahgunaan narkoba, pertama minimnya personel kepolisian dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah masyarakatnya. Kedua, minimnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi terkait peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Ketiga, alokasi dana dalam pemberantasan narkoba masih minim. Keempat, bocornya informasi saat akan dilakukannya penggerebek atau penangkapan. Kelima, pelaku yang sudah ditangkap tidak mau memberikan informasi terkait dengan jaringan sindikatnya. Keenam, kurangnya perhatian pemerintah terhadap mantan narapidana sehingga sering terjerat dengan kasus yang sama lagi.